

Rp1,6 Miliar dari Ubur-Ubur, Baubau Masuk Peta Ekspor Global, Hingga Resmi Tembus Pasar Tiongkok



Laporan: Ardi, Baubau Post-Durasi Times

BAUBAU, BP-Pelabuhan Murhum, Kota Baubau, kini resmi menjadi pintu ekspor langsung komoditas unggulan daerah. Ekspor perdana ubur-ubur ke Tiongkok yang dilakukan PT Triko Bina Nusantara menandai babak baru konektivitas perdagangan internasional dari wilayah Kepulauan Buton.

Pada tahap awal, perusahaan tersebut mengirimkan empat kontainer ubur-ubur dengan nilai transaksi mencapai Rp1,6 miliar. Ekspor ini direncanakan

Lanjut ke Hal: 7

Ratusan Kepala Daerah Menerima Penghargaan Universal Health Coverage Awards Tahun 2026 Termasuk Bupati Buton Selatan Muh Adios dan Walikota Baubau H Yusran Fahim



Laporan: Ardi

JAKARTA, DT - Komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kembali mendapat apresiasi. Sebanyak 31 Pemerintah Provinsi serta 397 Pemerintah Kabupaten dan Kota menerima penghargaan pada ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun

2026 yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, Selasa (27/1/2026).

Penghargaan tersebut diberikan kepada para kepala daerah atas peran aktifnya dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat melalui perluasan dan keberlanjutan kepesertaan Program JKN, termasuk Bupati Buton Selatan Muh Adios

Direktur Utama BPJS

Kesehatan, Ghuftron Mukti, mengatakan capaian tersebut mencerminkan keberhasilan kolaborasi lintas sektor dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan. Program JKN menjadi instrumen negara untuk memastikan perlindungan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Alvin Akawijaya Perkuat Mesin Birokrasi Lewat Pelantikan Sekda Definitif, La Ode Syamsudin Siap Kawal Program Prioritas Bupati Buton

Laporan: Ardi

BUTON, BP- Pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Buton resmi digelar Pemerintah Kabupaten Buton, Senin (26/1/2026). Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., melantik La Ode Syamsudin, S.Pd., M.Si., dalam prosesi yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton, Takawa.

Acara pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Buton, Ketua DPRD

Lanjut ke Hal: 7



Bupati Buton Alvin Akawijaya lantik Sekda Definitif

Pendidikan Busel Masuki Era Coding dan Kecerdasan Artifisial, Selamat Tinggal Program Sekolah dan Guru Penggerak

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, DT- Transformasi pendidikan digital mulai menguat di Kabupaten Buton Selatan seiring implementasi program pembelajaran mendalam (deep learning) serta pengenalan coding dan kecerdasan artifisial (AI) di sejumlah sekolah. Program ini menjadi kelanjutan arah kebijakan nasional setelah Program Sekolah Penggerak resmi dihentikan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan



Rusmin, S. Pd

memastikan bahwa perubahan kebijakan tersebut tidak menghambat peningkatan mutu pendidikan di daerah. Justru sebaliknya, sebagian besar se-

kolah dan tenaga pendidik yang sebelumnya terlibat dalam Program Sekolah Penggerak tetap diberdayakan dalam program baru.

Sekretaris Dinas Pendidikan Buton Selatan, Rusmin, S.Pd, melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, La Amiru, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa penghentian Program Sekolah Penggerak merupakan keputusan pemerintah pusat, bukan kebijakan pemerintah daerah.

Lanjut ke Hal: 7

Pemprov Sultra Targetkan 1.000 Beasiswa untuk SDM Unggul, Pemprov Sultra-Kemendiktisaintek Percepat Sekolah Garuda



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mempertegas komitmennya dalam mendukung Program Sekolah Garuda melalui penguatan

kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Langkah ini dipandang strategis untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya

manusia di daerah.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen

Lanjut ke Hal: 7

Rp1,6 Miliar dari Ubur-Ubur, Baubau Masuk Peta Ekspor Global, Hingga Resmi Tembus Pasar Tiongkok

berlangsung berkelanjutan dan akan terus ditingkatkan seiring tingginya permintaan pasar global, khususnya dari Tiongkok.

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua M. Ling, menyatakan bahwa ekspor dari Baubau terintegrasi dengan kegiatan ekspor serentak di Kendari. Melalui Pelabuhan Bungkutoko, sebanyak 47 kontainer komoditas dilepas ke pasar internasional dengan nilai mencapai sekitar Rp500 miliar.

Menurut Hugua, capaian tersebut mencerminkan konsistensi strategi ekspor Sulawesi Tenggara yang dibangun secara berkelanjutan, mulai dari penguatan produksi di hulu hing-

ga sistem distribusi dan pengiriman di hilir.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Baubau, Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, MSc, menegaskan bahwa ekspor langsung dari Pelabuhan Murhum merupakan lompatan besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Selama ini, potensi ubur-ubur lebih dari 3.000 ton per tahun tercatat keluar melalui pelabuhan luar daerah seperti Surabaya dan Makassar.

“Dengan dibukanya jalur ekspor langsung, daerah tidak hanya memperoleh pencatatan volume riil, tetapi juga manfaat fiskal, insentif keuangan, serta kontribusi devisa yang lebih jelas,” ujar Hamsinah dalam keterangannya.

Ia menambahkan,

keberhasilan ekspor perdana ini juga membawa pesan kuat bagi dunia usaha. Bagi investor, Baubau dinilai telah menunjukkan kesiapan infrastruktur dan ketersediaan bahan baku. Ekspor nelayan serta produsen, ekspor ini memberi kepastian pasar dan harapan baru atas hasil produksi mereka.

Pemerintah Kota Baubau, lanjut Hamsinah, tidak berhenti pada komoditas ubur-ubur. Sejumlah sektor telah masuk dalam agenda pengembangan ekspor berikutnya, khususnya sektor perikanan dan pertanian.

Komoditas yang tengah diprioritaskan antara lain ikan tuna segar grade A, lobster, rumput laut, serta ubi kayu

(singkong) yang dinilai memiliki peluang besar di pasar internasional.

“Kita ingin komoditas unggulan daerah dapat dikemas dan diberangkatkan langsung dari Baubau. Ekspor harus terus ditingkatkan dan diperluas,” tegasnya.

Kegiatan ekspor perdana ini turut dihadiri berbagai pihak, mulai dari pejabat Pemerintah Provinsi Sultra, Sekda Kabupaten Buton La Ode Samsudin, KSOP Pelabuhan Murhum, KPPN Baubau, KPP Pratama, Balai Karantina, Bea Cukai, Polres Baubau, Dinas Perikanan Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, unsur penjamin mutu, hingga investor. (*)

Ratusan Kepala Daerah Menerima Penghargaan Universal Health Coverage Awards Tahun 2026 Termasuk Bupati Buton Selatan Muh Adios dan Walikota Baubau H Yusran Fahim

“Hingga 31 Desember 2025, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen. Capaian ini melampaui target nasional dalam RPJMN 2025â€“2029,” ujar Ghufron.

Ia menegaskan, peran Kepala daerah sangat menentukan keberhasilan tersebut, khususnya dalam mendorong pendaftaran penduduk serta menjaga kepesertaan aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah.

Ghufron juga menyampaikan bahwa pencapaian UHC sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, di mana Universal Health Coverage menjadi indikator utama target SDGs 3.8 untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh penduduk.

Tak hanya meningkatkan akses layanan, capaian UHC juga

berdampak pada kesejahteraan sosial. Berdasarkan penelitian LPEM FEB UI tahun 2025, daerah yang telah mencapai UHC tercatat memiliki tingkat kesakitan lebih rendah, akses pelayanan kesehatan yang lebih baik, serta penurunan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga.

“Rata-rata kunjungan peserta JKN ke fasilitas kesehatan kini mencapai dua juta kunjungan per hari, menandakan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan,” tambahnya.

Dalam menjaga kualitas layanan, BPJS Kesehatan terus memperkuat kerja sama dengan fasilitas kesehatan, mendorong penguatan layanan primer, serta mengembangkan layanan digital. Berbagai kanal non sampai tatap muka telah tersedia, seperti Aplikasi Mobile JKN, layanan PANDAWA melalui WhatsApp

08118165165, serta Care Center 165. Peserta juga dapat memanfaatkan antrean online dan fitur i-Care JKN untuk melihat riwayat pelayanan kesehatan.

Sebagai bentuk apresiasi, UHC Awards 2026 diberikan dalam tiga kategori, yakni Utama, Madya, dan Pratama. Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi daerah lain untuk mempercepat perluasan perlindungan kesehatan melalui Program JKN.

“Capaian ini bukan akhir, melainkan fondasi awal dalam menjaga keberlanjutan Program JKN sebagai gotong royong seluruh anak bangsa,” ujar Ghufron.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul MuhaiminI skandar menegaskan bahwa Program JKN merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

“Program JKN me-

mastikan masyarakat tidak jatuh miskin karena sakit. Kesehatan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan bangsa,” kata Cak Imin.

Ia menargetkan cakupan kepesertaan JKN mencapai 99 persen penduduk pada 2029, serta menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan dan kualitas layanan kesehatan.

“Tidak boleh ada daerah yang jumlah peserta JKN-nya menurun. Selain memperluas cakupan, kualitas layanan juga harus terus ditingkatkan agar manfaat JKN benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

“Pemberian UHC Awards 2026 diharapkan menjadi pemacu bagi daerah yang belum mencapai UHC, sehingga seluruh masyarakat Indonesia terlindungi dan Indonesia semakin sehat,” tutup Abdul MuhaiminI. (*)

Pendidikan Busel Masuki Era Coding dan Kecerdasan Artifisial, Selamat Tinggal Program Sekolah dan Guru Penggerak

“Penghentian ini bukan dari daerah, tetapi langsung dari kementerian karena ada arah kebijakan baru dalam pengembangan kualitas pembelajaran,” kata La Amiru saat ditemui, Rabu (28/1/2026).

Ia menjelaskan bahwa pelantikan terakhir Guru Penggerak telah dilaksanakan pada 3 Desember 2024. Sejak itu, program tersebut tidak lagi dilanjutkan dan secara resmi tidak berjalan memasuki tahun 2026.

Meski demikian, substansi penguatan kualitas guru dan sekolah tetap berlanjut. Menurut La Amiru, program pembelajaran mendalam dan coding pada dasarnya melanjutkan semangat Sekolah Penggerak dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

“Tidak ada dampak signifikan bagi sekolah. Sekolah dan guru penggerak tetap terlibat, hanya istilah programnya yang berubah,” ujarnya.

Di Kabupaten Buton Selatan, sebelumnya terdapat delapan Sekolah Penggerak. Seluruh sekolah tersebut kini masuk dalam cakupan program baru. Bahkan jumlah sekolah penerima program mengalami peningkatan.

Untuk pelaksanaan pembelajaran mendalam dan coding, terdapat 16 SD yang terlibat, 16 sekolah penerima program coding, serta 18 sekolah yang terintegrasi melalui kerja sama dengan jenjang SMA. Sekolah yang terlibat dipilih berdasarkan kriteria tertentu, khususnya penerima BOS Kinerja.

Bupati Alvin Akawijaya Perkuat Mesin Birokrasi Lewat Pelantikan Sekda Definitif, La Ode Syamsudin Siap Kawal Program Prioritas Bupati Buton

Kabupaten Buton, unsur Forkopimda, para asisten dan staf ahli bupati, kepala OPD, camat se-Kabupaten Buton, serta perwakilan perbankan.

Dalam sambutannya, Bupati Alvin menegaskan bahwa pengangkatan Sekda definitif merupakan langkah strategis untuk memperkuat kinerja pemerintahan daerah. Menurutny, peran Sekda sangat vital dalam memastikan jalannya roda birokrasi berjalan efektif dan profesional.

Pelantikan ini juga diharapkan dapat mempercepat realisasi program-program prioritas daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Bupati Alvin menyampaikan harapannya agar Sekda yang baru mampu bekerja lebih fokus dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan yang di-

adapi Kabupaten Buton saat ini.

“Saya harap Buton akan lebih baik lagi dari sisi keuangan dan sumber daya manusia,” ujar Bupati dalam sambutannya.

Ia juga menekankan pentingnya peran Sekda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta membangun suasana kerja yang sehat di lingkungan pemerintahan. “Insyaallah kita akan mencapai itu semua. Saya ingin kita semua bahagia,” tambahnya.

Selain itu, Bupati Alvin mengingatkan seluruh jajaran agar bekerja profesional dan tidak pernah mencabut nama Bupati untuk kepentingan jabatan maupun kepentingan pribadi.

Usai pelantikan, La Ode Syamsudin menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia juga menyampaikan

Program tersebut telah dilaksanakan selama tiga bulan, mulai Agustus hingga Desember 2025. Namun, untuk kelanjutan pada tahun 2026, pihak Dinas Pendidikan masih menunggu kepastian kebijakan lanjutan karena proses penyusunan DPA dan perencanaan anggaran masih berlangsung.

Dukungan terhadap transformasi digital pendidikan juga diperkuat dengan adanya bantuan perangkat Smart TV dari pemerintah pusat. La Amiru menyebut hampir seluruh sekolah di Buton Selatan, mulai dari TK, SD hingga SMP, telah menerima bantuan tersebut.

“{Smart TV menjadi sarana penting untuk mendukung pembelajaran digital, termasuk implementasi coding dan pembelajaran mendalam. Sebagian sekolah sudah mulai memanfaatkannya sejak 2025 dan akan lebih maksimal pada 2026,” jelasnya.

Sementara itu, Rusmin juga mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan nasional tahun 2026 mengusung tujuh fokus utama, yakni redistribusi guru ASN, pembaruan manajemen kinerja guru dan kepala sekolah, transformasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), penguatan pendidikan karakter, penerapan deep learning, pengenalan coding dan AI, serta penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA).

“TKA nantinya akan diikuti siswa kelas 6 SD dan kelas 9 SMP sebagai instrumen evaluasi nasional, menggantikan ujian nasional yang sebelumnya dihapus,” kata Rusmin.

Pemerintah daerah berharap, implementasi kebijakan dan program baru tersebut dapat memperkuat kualitas pendidikan di Buton Selatan, baik dari aspek akademik, karakter, maupun literasi digital peserta didik. (*)

terima kasih kepada Bupati Buton, Gubernur, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan.

“Insya Allah amanah ini akan saya jaga dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata La Ode Syamsudin kepada awak media.

Ia menegaskan bahwa sebagai Sekda, tugas utamanya adalah membantu Bupati dalam mengoordinasikan perangkat daerah serta memastikan program pemerintah berjalan efektif, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah keterbatasan fiskal.

Lebih lanjut, mantan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton itu juga menyatakan komitmennya untuk membangun kolaborasi dengan seluruh elemen, termasuk insan pers. “Saya akan berkolaborasi dengan semua pihak,” tutupnya. (*)

Pemprov Sultra Targetkan 1.000 Beasiswa untuk SDM Unggul, Pemprov Sultra-Kemendiktisaintek Percepat Sekolah Garuda

TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Prof. Brian Yulianto, ST, M.Eng., PhD, di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Anjangsana Lantai 18 Gedung D Kementerian Diktisaintek tersebut menjadi forum pembahasan berbagai langkah percepatan pembangunan pendidikan unggulan, khususnya dalam pelaksanaan Program Sekolah Garuda di Sulawesi Tenggara.

Dalam audiensi itu, Pemprov Sultra menyampaikan kesiapan

mendukung pembangunan akses infrastruktur menuju lokasi Sekolah Garuda di Kabupaten Konawe Selatan. Salah satu bentuk dukungan konkret ialah rencana pelebaran jalan yang ditargetkan mulai dilaksanakan pada Maret 2026.

Selain infrastruktur, pemerintah daerah juga mendorong agar alumni Sekolah Garuda di masa mendatang dapat kembali mengabdikan dan berkontribusi dalam pembangunan daerah sebagai bagian dari penguatan ekosistem SDM lokal.

Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa dukungan

Pemprov Sultra tidak hanya bersifat simbolik, melainkan diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis. Ia menilai Program Sekolah Garuda merupakan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendukung sepenuhnya Program Sekolah Garuda karena merupakan kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujar Andi Sumangerukka.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov Sultra juga menyiapkan program beasiswa gratis bagi mahasiswa ber-

prestasi yang melanjutkan studi di perguruan tinggi negeri maupun luar negeri. Program ini menjadi bagian dari investasi jangka panjang pembangunan SDM daerah.

Pada tahap awal, beasiswa tersebut akan diberikan kepada 100 orang dari target keseluruhan sebanyak 1.000 penerima. Program ini dirancang untuk menjangkau lebih banyak generasi muda potensial Sulawesi Tenggara.

Dukungan lainnya adalah rencana pembangunan sekolah unggulan pada jenjang SD, SMP, dan SMA yang akan menopang implementasi Sekolah Garuda di

daerah. Pemprov Sultra juga menyiapkan empat SMA transformasi sebagai bagian dari strategi penguatan pendidikan menengah.

Sementara itu, Mendiktisaintek RI Prof. Brian Yulianto menyampaikan apresiasi atas komitmen kuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam

mendukung program tersebut. Ia berharap gubernur dapat terus mengawal proses pembangunan Sekolah Garuda, khususnya pada aspek keamanan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta pelaporan perkembangan secara berkala.

Menurut Prof. Brian, audiensi tersebut

menjadi langkah positif dalam memastikan kelancaran pelaksanaan Program Sekolah Garuda. Ia juga menyampaikan rencana untuk melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara guna meninjau langsung progres pembangunan di Kabupaten Konawe. (*)

Surabaya Resmi Miliki Satgas Anti Premanisme dan Mafia Tanah



Laporan: Alwan

SURABAYA- Kota Surabaya resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah sebagai langkah menjaga keamanan serta kepastian hukum di Kota Pahlawan, dengan apel perdana yang dilaksanakan di Taman Surya Balai Kota Surabaya pada Senin (5/1).

Satgas ini merupakan gabungan unsur Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, TNI, Polri, Kejaksaan, hingga Pengadilan Negeri (PN).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan penyelesaian sengketa tanah tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Menurutnya, seluruh persoalan pertanahan dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan dengan tindakan sepihak.

“Kita siapkan posko di masing-masing wilayah, Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan, dan Pusat. Saya juga mohon kepada warga Surabaya, kalau ada permasalahan sengketa tanah, kita ada Satgas Mafia Tanah dan Satgas Penanganan Premanisme, karena negara kita ini negara hukum,” kata Eri, Rabu (28/1).

Ia juga menyoro-ti praktik intimidasi yang kerap muncul dalam konflik pertanahan. Keberadaan Satgas ini diharapkan mampu menghentikan tindakan tersebut sekaligus memastikan penyelesaian sengketa berjalan adil sesuai hukum.

“Jangan menggunakan kekuatan lainnya, jangan menggu-

nakan pihak-pihak lainnya. Sehingga tidak ada premanisme di Kota Surabaya,” ujarnya.

Eri pun mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan setiap dugaan premanisme maupun mafia tanah. Dengan pelaporan yang cepat, ia berharap tidak ada lagi konflik pertanahan yang merugikan masyarakat di kemudian hari.

“Saya mohon kepada warga Surabaya untuk berani melapor,” pesannya.

Satgas Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah berfungsi menindak segala bentuk kekerasan dan pemaksaan dalam sengketa tanah. Pemkot Surabaya juga membuka layanan pengaduan masyarakat melalui hotline 08170013010 serta Command Center (CC) 112.

“Siapa yang membuat suasana Surabaya tidak tenang dengan kekerasan, dengan pemaksaan, maka Satgas penanganan premanisme ini akan turun,” kata Eri.

Hingga 28 Februari 2026, Satgas telah menerima puluhan laporan dari masyarakat. Dari jumlah tersebut, 81 laporan berkaitan dengan tanah dan 14 lainnya dugaan praktik premanisme. Selain melalui hotline, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan dengan mendatangi Posko Satgas yang berlokasi di Jalan Sedap Malam atau melalui kantor kelurahan setempat.

Wali Kota Eri menjelaskan kelurahan diberikan waktu maksimal 2x24 jam untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan bersama Satgas Mafia Tanah.

“Kelurahan memiliki waktu 2x24 jam untuk menyelesaikan laporan bersama Satgas Mafia Tanah. Mari kita jaga kota ini bersama-sama. Surabaya adalah kota yang berlandaskan hukum, dan negara kita adalah negara hukum,” ujarnya.

Komitmen menjaga kondusifitas Surabaya sebelumnya juga ditegaskan dalam kegiatan “Deklarasi Surabaya Bersatu” yang digelar di halaman Balai Kota Surabaya pada akhir tahun lalu. Kegiatan deklarasi ini diikuti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya, bersama ribuan warga dari berbagai latar belakang suku, agama, dan organisasi masyarakat (Ormas).

Dalam kesempatan itu, Kepala Staf Komando Garnisun Tetap (Kaskogartap) III/Surabaya Brigjen TNI (Mar) Danuri menekankan pentingnya kebersamaan seluruh elemen dalam menjaga keamanan Kota Pahlawan.

“Kita menginginkan satu komitmen bersama. Surabaya harus aman, Surabaya harus nyaman. Berikan kesempatan dan peluang kepada wali Kota Surabaya untuk mewujudkan itu,” kata Brigjen TNI (Mar) Danuri.

Ia menambahkan, seluruh pihak harus menjunjung supremasi hukum dalam setiap tindakan.

“Hukum adalah panglima tertinggi. Tidak ada hukum rimba, tidak ada hukum keinginan kita,” katanya.

Sementara itu, Wakil Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI (Mar), Arinto Beny

Sarana, menyatakan kesiapan penuh Korps Marinir dalam mendukung upaya pemberantasan premanisme di Surabaya.

“Tugas kita bersama mewujudkan Kota Surabaya nyaman, aman, dan tertib. Bukan tugasnya TNI-Polri saja, tapi seluruh komponen bangsa,” kata Beny.

Ia menyampaikan, Korps Marinir siap mendukung langkah tegas Wali Kota Eri Cahyadi dalam pemberantasan premanisme. Bahkan, pihaknya siap menerjunkan 10 ribu prajurit Marinir untuk membantu menjaga kondusifitas Surabaya.

“Ada 10 ribu prajurit saya yang tergelar di sini. Jadi kita bersama-sama komponen dan seluruh elemen masyarakat, mewujudkan Kota Surabaya nyaman, aman, tertib, bukan hanya bagi warga Surabaya, tapi bagi para pengunjung pun ikut nyaman kalau hadir di Surabaya,” tuturnya.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol. Luthfi Sulistyawan menilai deklarasi Surabaya Bersatu ini menjadi simbol kuatnya persatuan seluruh elemen masyarakat di Kota Pahlawan.

“Kita semua sepakat, kita adalah satu, warga Kota Surabaya. Tidak boleh ada sekat-sekat asal-usul, suku, maupun agama,” ujar Luthfi.

Luthfi juga memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum dan setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai aturan. “Setiap aksi anarkis, perusakan, dan main hakim sendiri akan diproses secara hukum secara tegas dan konsisten,” tegasnya.

Hal senada disam-

DPR Minta Percepatan Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat



Laporan: Hamid

JAKARTA- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP Abidin Fikri mengingatkan pemerintah mempercepat pembangunan gedung baru untuk Sekolah Rakyat.

Ia mengatakan saat ini banyak Sekolah Rakyat di Sentra dan Balai Kementerian Sosial yang sudah kelebihan kapasitas.

Abidin telah menyampaikan usulan ini saat rapat bersama Menteri Sosial Saifulah Yusuf (Gus Ipul) kemarin.

“Yang kami kunjungi di sekolah rakyat, khususnya di sentra-sentra itu sudah over capacity. Artinya, tidak memungkinkan lagi pada tahun ajar baru dia menerima murid,” kata Abidin dalam keterangan tertulis, Rabu (28/1/2026).

Ia menjelaskan

siswa yang saat ini berada di kelas 1 SMP atau SMA akan naik ke kelas 2. Namun, kelas baru untuk siswa kelas 1 tidak tersedia karena keterbatasan ruang belajar.

Abidim khawatir pada tahun ajaran 2026 tidak ada penerimaan siswa baru lantaran tidak tersedia ruang kelasnya.

“Kalau tidak ada akselerasi pembentukan sekolah rakyat di kabupaten-kabupaten yang itu kewenangan di Kementerian PU, itu nanti tahun depan dia naik kelas 2, nggak ada lagi kelas satunya. Tolong dipikirkan itu agar ini nggak stuck,” ujarnya.

Abidin juga menekankan pentingnya memetakan secara jelas antara sekolah yang ada di sentra dan yang bekerja sama. Hal itu penting agar

pemerintah dapat memastikan kapasitas sekolah cukup untuk menampung siswa baru.

Ia mencontohkan beberapa sekolah rakyat yang bekerja sama, misalnya di Bekasi dengan Pangu-di Luhur, sudah memiliki skema penerimaan siswa baru.

Namun, sekolah yang berada di sentra seringkali sudah penuh, sehingga tahun depan tidak bisa menambah siswa kelas 1.

“Tahun ajaran (baru) kan bulan Juli. Jadi yang di sentra itu kelas 1 SMA akan naik menjadi kelas 2. Begitu juga yang SMP akan naik kelas 2. Kalau sekolah rakyat di sentra-sentra itu tidak bisa menampung, berarti tidak akan ada penerimaan siswa baru, ini yang harus dipikirkan,” katanya. (*)

Soal Isu Reshuffle Kabinet, PDIP Beri Catatan untuk Pemerintah

JAKARTA-PDI Perjuangan merespons soal isu kocok ulang kabinet atau reshuffle yang menguat dalam beberapa waktu terakhir.

Juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli berharap jika reshuffle benar-benar dilakukan, keputusan tersebut didasarkan pada kinerja menteri dan kepentingan rakyat, bukan pertimbangan politik.

“Kami berharap kalau terjadi reshuffle, itu memang benar-benar atas dasar pertimbangan kinerja dan kepentingan rakyat secara riil ya. Bukan bagi-bagi jabatan, bukan kalkulasi politik, bukan pengalihan isu,” kata Guntur

dalam Inside Politics CNN Indonesia TV, Selasa (27/1) malam.

Menurutnya, presiden pasti memiliki berbagai laporan tentang kinerja para menteri. Ia menginginkan menteri yang diganti adalah mereka yang memiliki tingkat kepuasan tinggi.

“Jangan sampai yang diganti misalnya itu yang kepuasannya tinggi malah diganti, karena dia mungkin tidak punya dukungan politik yang kuat atau alasan politik malah diganti dan juga yang disorot oleh publik malah tetap dipertahankan,” ujarnya.

Ia mengatakan dari percakapan publik dan hasil survei, sudah terlihat kementerian

mana yang kepuasannya rendah dan tinggi.

“Nah kita juga nanti akan melihat, meskipun ini adalah hak prerogatif Presiden, tapi kan masyarakat yang akan merasakan sendiri dari perubahan kebijakan tersebut,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari mengatakan evaluasi pasti dilakukan presiden kepada menteri terkait program-program prioritas.

Evaluasi itu bisa berbentuk rekomendasi, saran arahan atau instruksi.

“Tetapi dalam konteks tertentu dan mungkin dalam timeline tertentu bisa saja

paikan Dandim 0830/Surabaya Kolonel Infanteri Bambang Raditya. Ia memastikan Surabaya tidak akan memberi ruang bagi

segala bentuk intimidasi dan pemaksaan kehendak. “Masyarakat juga diimbau tidak mudah terprovo-

kasi informasi media sosial yang belum tentu benar karena hanya memperbesar perpecahan,” pungkasnya. (*)

Program JKN Berjalan Efektif, Gubernur Sultra ASR Terima Penghargaan UHC Award 2026



Laporan: Mashuri

JAKARTA, BP—"Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) dalam memperluas akses layanan kesehatan kembali mendapat pengakuan nasional setelah daerah ini meraih UHC Award 2026 kategori Madya dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 89,65 persen peserta aktif.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dalam acara Deklarasi dan Pencanangan UHC serta Penghargaan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Pengakuan tersebut menjadi bukti keber-

hasilan Pemprov Sultra dalam menjalankan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara berkelanjutan dan inklusif, sekaligus mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan data per 1 Desember 2025, cakupan peserta aktif JKN di Sulawesi Tenggara tercatat mencapai 2.553.935 jiwa atau setara dengan 89,65 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 602.806 peserta merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tersebut menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024, cakupan UHC Sultra berada pada angka 86,04 persen dengan total

2.430.237 peserta aktif, sementara peserta PBI yang didanai APBD tercatat sebanyak 559.993 orang.

Gubernur Andi Sumangerukka menilai capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, baik pemerintah, pemangku kepentingan, maupun masyarakat.

"Capaian ini merupakan wujud nyata semangat gotong royong dalam membangun masyarakat Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius," ujar Gubernur.

Ia menegaskan bahwa Pemprov Sultra akan terus memperkuat komitmen dalam menjamin perlindungan kesehatan masyarakat, sekaligus menargetkan peningkatan cakupan peserta aktif hingga 95 persen agar Sulawesi Tenggara dapat masuk ke kategori UHC Utama.

Sebagai bagian dari strategi pencapaian

target tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sultra akan melakukan pembenahan dan pemutakhiran data kepesertaan BPJS Kesehatan agar lebih akurat, valid, dan terintegrasi dengan sistem nasional.

Selain pembenahan data, Pemprov Sultra juga mendorong penguatan Program JKN melalui peningkatan literasi kesehatan, perluasan akses layanan, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan kolaborasi dengan sektor swasta.

Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan program JKN tidak hanya bergantung pada peran pemerintah dan pemberi kerja. Kesadaran masyarakat, khususnya peserta mandiri, dalam membayar iuran secara tertib dinilai menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlangsungan sistem perlindungan kesehatan nasional. (*)

Gubernur Lepas Ekspor Perdana Feronikel ke Tiongkok Bukti Kesiapan Industri dan Pelabuhan Sultra

Laporan: Lisna

SULTRA, BP-Sulawesi Tenggara mencetak tonggak baru dalam perdagangan internasional setelah berhasil melaksanakan direct ekspor perdana feronikel ke Tiongkok melalui Kendari New Port. Sebanyak 46 kontainer dengan muatan 1.015,16 metrik ton feronikel senilai USD 2,95 juta atau setara Rp49,49 miliar resmi diberangkatkan ke Pelabuhan Lianyungang, Rabu (28/1/2026).

Keberhasilan ekspor langsung ini dinilai sebagai bukti kesiapan infrastruktur

logistik daerah serta kemajuan industri pengolahan nikel Sulawesi Tenggara dalam memasuki rantai perdagangan global tanpa perantara pelabuhan luar daerah.

Pelepasan ekspor dilakukan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, di Terminal Peti Kemas Kendari New Port. Dalam sambutannya, gubernur menekankan bahwa capaian tersebut harus memberi dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Ekspor perdana

ini membuktikan bahwa sistem industri, pelabuhan, dan logistik kita semakin siap dan kompetitif. Namun, manfaat pentingnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat Sulawesi Tenggara," ujar Andi Sumangerukka.

Ekspor ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional IV Kendari dan PT Winarapan. Sinergi tersebut dipandang sebagai model kemitraan yang mampu memperkuat posisi Sulawesi Tenggara dalam jaringan industri dan perdagangan internasional, khususnya sek-

tor pertambangan dan pengolahan nikel.

Menurut gubernur, Sulawesi Tenggara memiliki cadangan mineral yang sangat besar, terutama nikel, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara bijak, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan daerah.

Ia menegaskan, pemerintah provinsi tidak lagi menginginkan ekspor bahan mentah tanpa nilai tambah. Hilirisasi industri harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong transfer teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Linguistik Forensik Jadi Fokus Kerja Sama Kominfo Sultra dan UHO

SULTRA, BP-Upaya menghadirkan kajian ilmiah yang objektif dalam merespons dinamika wacana publik mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara menjajaki kolaborasi strategis dengan Balai Bahasa Sultra serta Universitas Halu Oleo (UHO).

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kominfo Sultra, Andi Syahrir, menegaskan bahwa ruang publik saat ini dipenuhi berbagai narasi yang kerap memicu kebisingan informasi, konflik tafsir, hingga potensi disarmoni sosial. Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan dukungan pandangan akademik yang jernih dan berbasis ilmu pengetahuan.

Sebagai tindak lanjut, Kominfo Sultra menggagas pembentukan kelompok kerja (pokja) lintas institusi yang akan melibatkan Balai Bahasa, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ilmu Budaya UHO. Pokja ini dirancang menjadi wadah kajian, edukasi publik, serta analisis ilmiah terhadap persoalan kebahasaan dan wacana yang berkembang di media massa maupun media sosial.

Gagasan tersebut mendapat sambutan positif dari lingkungan akademik. Dekan Fakultas Ilmu Budaya UHO, Dr. Akhmad Marhadi, S.Sos., M.Si., menilai inisiatif ini sebagai langkah

strategis yang relatif baru dan membuka ruang kontribusi akademik yang lebih luas bagi dunia kampus dalam mendukung kebutuhan pemerintah daerah.

"Kami sangat terbuka terhadap kolaborasi ini. Selain bermanfaat bagi pengembangan akademik, kerja sama ini juga dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah," ujarnya.

Dukungan serupa disampaikan Dekan Fakultas Hukum UHO, Dr. Guasman Tatawu, S.H., M.H. Ia menyatakan bahwa dunia akademik memiliki tanggung jawab moral untuk terlibat dalam memberi tafsir ilmiah terhadap isu-isu kebahasaan yang kerap bersinggungan dengan persoalan hukum.

"Kami siap berkolaborasi. Dalam praktik hukum, tidak selalu terdapat tafsir tunggal, sehingga dialog akademik menjadi sangat penting untuk memahami isu secara lebih komprehensif," katanya.

Komitmen kerja sama tersebut dibangun melalui rangkaian kunjungan kerja yang dilakukan Plt. Kadis Kominfo Sultra pada akhir Januari 2026. Pada Senin, 27 Januari 2026, Andi Syahrir mengunjungi Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, disusul kunjungan ke Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Budaya UHO pada Selasa, 28

Januari 2026.

Di Balai Bahasa Sultra, Andi Syahrir disambut langsung oleh Kepala Balai Bahasa, Dewi Pridayanti, bersama jajaran. Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama dalam penguatan kebijakan kebahasaan, termasuk pengembangan kajian linguistik forensik.

Dewi Pridayanti menyampaikan bahwa Balai Bahasa Sultra pada prinsipnya sangat terbuka terhadap kerja sama lintas lembaga, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah.

Ia bahkan menegaskan bahwa Balai Bahasa Sultra siap memberikan layanan kebahasaan, seperti telaah dokumen, pendampingan bahasa, hingga pelatihan kebahasaan kepada instansi pemerintah tanpa dipungut biaya.

Lebih jauh, Dewi berharap kolaborasi yang terbangun nantinya tidak hanya berfokus pada linguistik forensik, tetapi juga turut mendorong implementasi Trigatra Bangun Bahasa, yakni mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, serta menguasai bahasa asing.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan dunia akademik tersebut, Kominfo Sultra berharap dapat memperkuat kualitas literasi publik serta menghadirkan ekosistem komunikasi yang lebih sehat, rasional, dan berbasis keilmuan di ruang publik digital. (*)



Selain aspek ekonomi, Gubernur Andi Sumangerukka juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan industri dan kelestarian lingkungan. Ia meminta seluruh pelaku usaha menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan serta memberdayakan masyarakat sekitar wilayah operasional.

Keberhasilan direct ekspor ini sekaligus memperkuat posisi Sulawesi Tenggara sebagai simpul strategis dalam mendukung kebutuhan bahan baku

industri global. Posisi geografis dan kesiapan pelabuhan dinilai membuka peluang lebih luas bagi peningkatan volume ekspor ke berbagai negara.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, lanjut gubernur, akan terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum, menjaga stabilitas daerah, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan dunia usaha.

Pada kesempatan tersebut, gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada pe-

merintah pusat atas dukungan kebijakan, kepada investor atas kepercayaan berinvestasi di Sultra, serta kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam terwujudnya ekspor langsung perdana tersebut.

Pemerintah daerah berharap, capaian ini menjadi awal dari pertumbuhan ekspor yang berkelanjutan, perluasan pasar internasional, serta masuknya investasi baru yang mampu mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. (*)

Sepanjang Tahun 2025 Kepuasan Layanan DPMPTSP Busel Capai 95 Persen, UMK Buton Selatan Tumbuh, Jumlah Pelaku Usaha Tembus 4.600



Kepala DPMPTSP Kabupaten Buton Selatan, Muhammad Thahir,

Laporan:Firman

BUTON SELATAN, BP-“ Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di Kabupaten Buton Selatan mencapai angka 90 hingga 95 persen sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut tercantum dalam laporan kinerja akhir tahun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan menjadi indikator keberhasilan pelayanan publik di sektor perizinan.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Buton Selatan, Muhammad Thahir, menegaskan bahwa tingginya tingkat kepuasan masyarakat tidak terlepas dari komitmen institusinya dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, serta bebas pungutan. Ia menyebut pelayanan perizinan di instansinya tidak dipungut biaya apa pun.

“Moto kami adalah profesional, amanah, senyum, dan tanpa memungut biaya alias gratis. Ini bentuk komitmen kami sebagai aparatur sipil negara dalam melayani masyarakat,” ujar Thahir.

Selain kualitas pelayanan, kinerja DPMPTSP juga tercermin dari pertumbuhan jumlah pelaku usaha di daerah tersebut. Ber-

dasarkan laporan rekapitulasi akhir tahun 2025, jumlah pelaku usaha di Buton Selatan tercatat telah melampaui angka 4.600 unit, dengan peningkatan signifikan pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Thahir menjelaskan, pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa sektor perizinan memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi daerah. Menurutnya, iklim usaha yang semakin kondusif turut mendorong masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi secara legal dan berkelanjutan.

Pelayanan perizinan di DPMPTSP Buton Selatan sendiri diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko, mulai dari risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, hingga risiko tinggi. Untuk UMK, kategori risiko berada pada tingkat menengah rendah, sehingga persyaratan yang diberlakukan relatif sederhana.

“Untuk UMK, selama persyaratan lengkap, izin dapat diterbitkan pada hari yang sama,” kata Thahir saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (29/1/2026).

Namun, sepanjang 2025, pelayanan perizinan sempat mengalami penyesuaian akibat

perubahan regulasi dari pemerintah pusat. Pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan menggantinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Perubahan regulasi tersebut berdampak pada mekanisme penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dalam ketentuan baru, proses perizinan UMK harus melalui sistem Amdalnet di Dinas Lingkungan Hidup sebelum kembali diproses dalam sistem Online Single Submission (OSS) untuk penerbitan NIB.

Kondisi tersebut sempat menimbulkan antrean serta keterlambatan layanan.

Meski demikian, Thahir memastikan bahwa proses pelayanan saat ini telah kembali berjalan normal setelah dilakukan harmonisasi sistem antarlembar. Menurutnya, penyesuaian tersebut justru memperkuat tata kelola perizinan agar lebih akuntabel.

Pada tahun depan, pelaku usaha tetap diarahkan untuk melengkapi persyaratan dasar, antara lain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), persetujuan lingkungan,

serta rekomendasi teknis bangunan gedung sebagai bagian dari standar pelayanan perizinan.

Di sisi lain, DPMPTSP Buton Selatan juga terus mengembangkan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya integrasi layanan. Sejumlah instansi daerah telah membuka layanan perwakilan di MPP, termasuk Dinas Lingkungan Hidup.

“Ke depan, masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik ke kantor lain karena pelayanan akan terpusat di satu tempat,” ujar Thahir.

Untuk instansi vertikal, koordinasi masih terus dilakukan dengan sejumlah lembaga seperti BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), meski belum seluruhnya berkantor tetap di MPP.

Thahir berharap, dengan sistem pelayanan perizinan yang semakin mudah, terintegrasi, dan transparan, kesejahteraan masyarakat Buton Selatan dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan aktivitas usaha di daerah tersebut. (*)

Retribusi Pasar Buton Selatan Tembus Rp150 Juta pada 2025, Disperdag Konsen Tertibkan Los Mangkrak demi Dongkrak Pendapatan Daerah Tahun 2026



Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Buton Selatan, Drs. Ganefo, M.H.,

Laporan:Firman

(29/1/2026).

BUTON SELATAN, DT - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Buton Selatan tetap optimistis penerimaan retribusi pasar pada 2026 dapat kembali melampaui target, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran dan berkurangnya dukungan operasional di tingkat lapangan.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Buton Selatan, Drs. Ganefo, M.H., mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 realisasi penerimaan retribusi pasar berhasil menembus angka lebih dari Rp150 juta, jauh di atas target yang ditetapkan sebesar Rp100 juta.

Capaian tersebut dinilai sebagai indikator adanya perbaikan dalam pengelolaan pasar rakyat, sekaligus mencerminkan potensi pendapatan daerah yang masih dapat terus dioptimalkan apabila tata kelola pasar diperkuat.

Namun demikian, Ganefo mengakui masih terdapat sejumlah pasar yang belum berkontribusi maksimal terhadap penerimaan. Pasar Lapola dan Pasar Mambulu, misalnya, masih menghadapi persoalan rendahnya tingkat pemanfaatan los oleh pedagang.

“Tidak semua los digunakan secara aktif. Ada yang terdapat, tetapi tidak menjalankan kegiatan jual beli,” ujar Ganefo saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis

Ia menjelaskan bahwa tarif retribusi telah ditetapkan secara proporsional berdasarkan ukuran los. Los berukuran 2 x 2,5 meter dikenakan tarif Rp25.000 per bulan, sedangkan los berukuran sekitar 3 x 3,5 meter dikenakan tarif Rp45.000 per bulan.

Persoalan utama yang sering terjadi adalah sebagian pengguna los tidak mampu mempertahankan aktivitas usaha. Banyak di antaranya terkendala permodalan dan tidak siap menghadapi risiko berdagang, sehingga los yang tersedia justru tidak produktif.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Dinas Perdagangan menerapkan kebijakan penertiban pemanfaatan fasilitas pasar. Di wilayah Sampolawa, los yang tidak digunakan selama enam bulan akan ditarik kembali, sementara di pasar lain diberlakukan batas maksimal tiga bulan.

Los yang ditertibkan selanjutnya akan dialokasikan kepada masyarakat yang benar-benar berprofesi sebagai pedagang, dengan harapan pasar dapat berfungsi optimal sebagai pusat aktivitas ekonomi rakyat.

Selain persoalan los, Ganefo juga menyoroti kondisi Pasar Mega Siompu dan Pasar Siompu Barat yang hingga kini belum dimanfaatkan maksimal, meskipun telah dibangun sejak sekitar 2020. Ia mengungkapkan bahwa kondisi tersebut bahkan telah menjadi

perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami sudah mendapat teguran karena fasilitas yang dibangun harus dimanfaatkan agar tidak menjadi beban negara,” ungkapnya.

Sebagai langkah pembenahan, Dinas Perdagangan berencana melakukan penataan ulang pasar di pusat kota pada 2026. Langkah ini mencakup pembauran nota kesepahaman (MoU) dengan pedagang serta penertiban pedagang kaki lima yang masih berjualan di area parkir.

Saat ini, baru sekitar 40 hingga 50 persen pedagang yang telah menyelesaikan administrasi perjanjian penggunaan los. Proses penataan akan terus dilanjutkan dengan mengutamakan pedagang lama dan membuka ruang bagi pedagang baru yang mendaftar secara resmi.

Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran turut memengaruhi operasional. Honor petugas penarik retribusi yang sebelumnya sebesar Rp500.000 per bulan kini ditiadakan, sehingga berpotensi menurunkan efektivitas pemungutan.

Sebagai solusi sementara, pihaknya telah berkoordinasi dengan para camat agar memanfaatkan tenaga paruh waktu dan P3K di kecamatan untuk membantu penarikan retribusi pasar. (*)

Wamenkes Tegaskan Komitmen Eliminasi Kanker Leher Rahim 2030 melalui Skrining DNA HPV Terintegrasi



Peliput: Warman

JAKARTA - Kementerian Kesehatan menegaskan komitmennya untuk mewujudkan eliminasi kanker leher rahim pada tahun 2030 melalui penguatan kebijakan dan layanan skrining yang terintegrasi. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, dalam Diseminasi Hasil Studi Implementasi untuk Mendukung Program ILP; Proyek Percontohan Skrining Kanker Leher Rahim dengan DNA HPV di Provinsi Jawa Timur.

Wamenkes menekankan bahwa visi bebas kanker leher rahim bukan sekadar target kesehatan, melainkan wujud komitmen negara dalam melindungi kehidupan perempuan serta keberlangsungan generasi bangsa.

“Kanker leher rahim masih menja-

di kanker terbanyak kedua pada perempuan di Indonesia. Sekitar 70 persen kasus baru terdiagnosis pada stadium lanjut, dan hampir 50 persen penderitanya kehilangan nyawa. Di balik angka ini, ada ibu, istri, dan anak perempuan yang memegang peran penting dalam keluarga dan masa depan bangsa,” ujar Wamenkes.

Menurutnya, persoalan kanker serviks harus dipandang sebagai persoalan sistemik yang memerlukan solusi komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan, bukan semata persoalan medis.

Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia telah menyatakan komitmen dalam World Health Assembly 2020 untuk mendukung agenda global eliminasi kanker serviks. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyusunan

Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Leher Rahim Tahun 2023-2030 sebagai peta jalan nasional jangka panjang.

Wamenkes menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Pilot Studi Skrining Kanker Leher Rahim dengan DNA HPV di Provinsi Jawa Timur yang didukung oleh Jhpiego, Roche, dan Biofarma. Studi ini dinilai memberikan gambaran nyata mengenai kesiapan layanan dan efektivitas strategi skrining di tingkat akar rumput.

“Pilot studi ini memberikan snapshot penting tentang kinerja kita dalam memperkuat layanan kanker serviks di lapangan. Pemerintah membutuhkan gambaran yang jujur dan kritis, mulai dari kesiapan fasilitas kesehatan hingga hambatan akses bagi kelompok kunci,” jelasnya.

Lebih lanjut, pemerintah berharap stu-

di ini menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat ditindaklanjuti bersama, khususnya dalam meningkatkan perilaku pencarian layanan kesehatan pada perempuan, penguatan tata kelola fasilitas kesehatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, serta inovasi program berbasis pemberdayaan masyarakat.

Wamenkes juga menegaskan pentingnya komitmen lintas sektor dalam mewujudkan eliminasi kanker leher rahim.

“Eliminasi kanker serviks adalah agenda bersama. Pemerintah menyambut dan mendukung kolaborasi strategis lintas sektor, karena penanganan kanker serviks membutuhkan kemitraan yang inklusif dan kemampuan kita untuk melangkah bersama melampaui sekat sektoral,” tegasnya. (*)

Skrining Kanker Leher Rahim Terintegrasi Program CKG, Pemerintah Perluas Akses DNA HPV dan Self-Sampling



JAKARTA - Pemerintah mengintegrasikan skrining kanker leher rahim ke dalam Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai upaya mempercepat deteksi dini dan menurunkan angka keterlambatan penanganan kanker serviks. Integrasi ini mencakup pemeriksaan DNA HPV serta penerapan pengambilan sampel mandiri (self-sampling) untuk meningkatkan partisipasi perempuan.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI Prof. Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa mulai 2026, skrining kanker leher rahim dalam CKG akan disertai dengan tindak lanjut yang jelas bagi hasil skrining positif.

“Integrasi skrining ke dalam Program

Cek Kesehatan Gratis merupakan respon nyata pemerintah untuk mencegah keterlambatan penanganan dan progresivitas lesi pra-kanker,” ujar Wamenkes.

Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, menjelaskan bahwa pemeriksaan DNA HPV, termasuk melalui self-sampling, menjadi solusi atas rendahnya minat perempuan terhadap pemeriksaan konvensional.

“Dengan metode self-sampling, perempuan dapat mengambil sampel sendiri dengan pendampingan petugas kesehatan, sehingga lebih mudah, nyaman, dan dapat diterima,” jelasnya.

Integrasi pemeriksaan DNA HPV juga akan dikembangkan

dalam paket medical check-up (MCU) di fasilitas kesehatan, seiring kebijakan integrasi MCU ke dalam Program CKG yang mulai diterapkan pada 2026. Program CKG sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah, sementara BPJS Kesehatan berperan pada tahap rujukan dan pengobatan lanjutan.

Penanganan lesi pra-kanker, termasuk terapi ablasi termal, telah disiapkan di fasilitas layanan primer seperti puskesmas agar hasil skrining dapat segera ditindaklanjuti.

Pemerintah berharap langkah ini dapat memperluas akses skrining, meningkatkan partisipasi perempuan, dan memperkuat upaya eliminasi kanker leher rahim pada 2030. (*)

Tim TCK Batch 3 Puskesmas Lapang Perkuat Layanan Kesehatan Pascabencana di Desa Kuala Cangko

Tim Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) Batch 3 Puskesmas Lapang memperkuat layanan kesehatan pascabencana bagi masyarakat Desa Kuala Cangko, Aceh

Utara, pada 20 Januari 2026. Tim yang terdiri atas dua dokter umum, dua vaksinator lokal, dan satu perawat jiwa ini bertugas pada 18-31 Januari 2026 untuk memberikan

layanan kesehatan dasar, imunisasi, serta dukungan psikososial.

“Hari ini ada kegiatan di dua titik. Pertama di posko pesisir pantai, dimana terdapat beberapa

posko pengungsian bagi masyarakat yang rumah rusak akibat banjir dan saat ini tinggal di tenda-tenda bantuan. Setelah itu, kami melanjutkan pelayanan di titik kedua,

benar, dan simulasi sederhana. Sementara itu, kelompok dewasa dan lansia mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan sesuai kebutuhan.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 30 anak menerima imunisasi MR dan 68 penyintas mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan.

“Ada beberapa layanan yang kami lakukan, pertama pelayanan kesehatan dasar, pemberian obat, kemudian edukasi berupa perilaku hidup bersih sehat, bagaimana cuci tangan yang rutin, dan penyuluhan pentingnya imunisasi

dan vaksinasi,” ujar dr. Andi, anggota tim TCK Puskesmas Lapang.

Ia menambahkan bahwa edukasi dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat terkait kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), seperti demam ringan pada anak.

Kepala Puskesmas Lapang, Mastuti, menyambut baik penugasan Tim TCK yang dinilai membantu penguatan layanan kesehatan, baik di posko pengungsian maupun melalui pelayanan kesehatan keliling di wilayah kerja Puskesmas Lapang. (*)

PT FAREN GRAFIKA

Harian Pagi

Baubau Post

KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
Redpel: Amat Jr
Korlip: Noval
Redaktur: Kasrun, Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Firman

Layouter: Ririn
Pracetak: Aditya
Cetak: Jamaludin

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Kepala Biro Wakatobi: Risman
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: Rahim
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

PPATK: Perputaran Uang Tambang Emas Tanpa Izin Capai Rp992 Triliun



Ilustrasi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana transaksi hasil Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) mencapai Rp992 triliun.

Laporan: Amran

JAKARTA-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana transaksi hasil Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) mencapai Rp992 triliun.

Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah menyebut total perputaran dana itu ditemukan pada periode 2023-2025. Adapun untuk nilai nominal transaksi pada periode itu mencapai Rp185,03 triliun.

“Selama periode 2023-2025, total nilai nominal transaksi yang diduga terkait PETI mencapai

Rp185,03 triliun, dengan total perputaran dana sebesar Rp992 triliun,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (29/1).

Natsir mengatakan secara khusus untuk tahun 2025, PPATK telah mengeluarkan 27 Laporan Hasil Analisis (LHA) dan 2 Laporan Informasi terkait sektor tambang dengan nominal transaksi mencapai Rp517,47 triliun.

Ia menjelaskan dari temuan PPATK itu paling banyak terkait aksi penambangan dan distribusi emas ilegal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

“Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara, Pulau Jawa, dan pulau lainnya, serta terdapat praktik aliran emas hasil PETI menuju pasar luar negeri,” ujarnya.

Sementara di sektor lingkungan hidup, kata dia, PPATK telah menyerahkan 15 LHA dengan nominal transaksi dugaan pidana mencapai Rp198,70 triliun.

Natsir mengatakan salah temuan yang menjadi sorotan PPATK yakni adanya perbuatan pidana dan mengakibatkan komoditas strategis menjadi langka dan harganya melambung

di tanah air.

“Pada sektor kehutanan, PPATK telah menyampaikan 3 LHA kepada Kementerian Kehutanan dengan nilai transaksi yang dianalisis mencapai Rp137 miliar,” tuturnya.

Ia menjelaskan nilai transaksi tersebut diduga merupakan hasil jual beli kayu yang berasal dari penambangan pohon secara ilegal.

“Karena tidak ditemukan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu yang menjadi prasyarat utama legalitas usaha kehutanan,” katanya. (*)

KPK Panggil Asisten Pribadi Eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil Hari Ini

Laporan: Alwan

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap asisten pribadi Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil, Randy Kusumaatmadja, Kamis (29/1).

Randy akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB), Kamis (29/1).

“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi atas nama RK (Personal Assistant Gubernur Jabar 2018-2023),” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis (29/1).

Belum diketahui materi spesifik yang hendak dialami penyidik lewat Randy. Hal itu biasanya akan disampaikan KPK keti-

ka pemeriksaan rampung.

Pada hari ini, KPK juga memanggil sejumlah saksi lain. Yakni Pimpinan SKAI BJB, Joko Hartoto; Direktur Golden Money Changer, Djunianto Lemuel; Pegawai Golden Money Changer, Arti; Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Gubernur, Ervin Yanuardi Effendi; dan Ibu Rumah Tangga, Wena Natasha Olivia.

Pemeriksaan dilakukan di Polda Jawa Barat, untuk melengkapi berkas perkara lima orang tersangka.

Sebelumnya, tepatnya pada 2 Desember 2025, KPK sudah memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai saksi.

KPK mencecar RK mengenai aliran uang dana non-bujeter yang dikelola Divisi Corpo-

rate Secretary BJB.

Tak hanya itu, KPK juga mendalami perihal aset-aset milik RK sebagaimana termuat atau di luar LHKPN yang sebelumnya dilaporkan ke KPK.

Sementara RK yang menjalani pemeriksaan lebih dari 5 jam mengaku tidak mengetahui pengadaan iklan di BJB dan membantah telah menerima aliran uang terkait dengan kasus yang sedang diurus tersebut.

Dia pun mengaku lega karena pada akhirnya bisa memberikan keterangan langsung di hadapan penyidik.

“Pada dasarnya yang paling utama adalah saya itu tidak mengetahui yang menjadi perkara dana iklan ini, karena dalam tupoksi (tugas pokok dan fungsi) gubernur, aksi korporasi dari BUMD ini itu dilakukan oleh teknis mereka sendiri,” tutur RK di Kantor

KPK, Selasa (2/12).

“Makanya kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu. Apalagi terlibat, menikmati hasilnya dan sebagainya. Mudah-mudahan klarifikasi saya ini bisa membuat spekulasi atau persepsi yang terbangun selama ini bisa lebih klar. Saya senang dengan undangan klarifikasi,” sambungnya.

Lima tersangka dalam kasus ini ialah mantan Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi; Pimpinan Divisi Corporate Secretary BJB Widi Hartoto; Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Kin Asikin Dulmanan; Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) Suhendrik; dan Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya

Agum Gumelar ke Wakapolri: Kedudukan Polri di Bawah Presiden



Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI (PEPABRI), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar bersama Wakapolri.

Laporan: Amran

JAKARTA-Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (PEPABRI), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar menegaskan bahwa kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden.

Hal ini disampaikan Agum kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Tahun 2026.

Dalam sambutannya, Wakapolri menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan para senior Polri dan PEPABRI. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi energi besar bagi seluruh jajaran Polri untuk terus mempercepat Transformasi

Polri yang berkelanjutan.

“Kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan fondasi utama dalam memperkuat efektivitas transformasi kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan profesionalisme personel,” kat Dedi, Kamis (29/1) dalam keterangan tertulisnya.

Dedi memaparkan sejumlah langkah yang telah dan terus dilakukan untuk mendorong transformasi menyeluruh di tubuh Polri.

Salah satunya adalah penguatan SDM dan pendidikan. Hal ini dilakukan dengan pembenahan sistem rekrutmen yang transparan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan karier berbasis kompetensi.

“Dalam waktu dekat, Polri akan membentuk Pusat Studi Kepolisian di 74 perguruan tinggi

di seluruh Indonesia guna memperkuat riset, inovasi, dan pengembangan ilmu kepolisian,” kata Dedi.

Selain itu ada upaya transformasi kultural dan etika profesi; penguatan pengawasan dan akuntabilitas; modernisasi sarana dan prasarana, serta transformasi digital, dan penguatan fungsi operasional.

Dedi mengatakan seluruh langkah tersebut merupakan komitmen nyata Polri dalam menjawab harapan Presiden dan masyarakat.

“Transformasi Polri adalah proses berkelanjutan. Dengan dukungan para senior, purnawirawan, dan seluruh elemen bangsa, kami optimistis Polri mampu menghadirkan perubahan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Dedi. (*)



KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap asisten pribadi Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil, Randy Kusumaatmadja.

Mandiri Bersama (CKMB) Raden Sophan Jaya Kusuma.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Un-

dang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Menurut temuan KPK, diduga ada perbuatan melawan hu-

kum dalam pengadaan penempatan iklan ke sejumlah media massa yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp222 miliar. (*)

Kemensos Respon Program Sekolah Rakyat di Baubau Masuk Tahap Ketiga, H Yusran Fahim: Tender Dimulai Maret 2026



Pewarta: Amat Jr

JAKARTA, BP - Kota Baubau dipastikan masuk dalam tahap ketiga pelaksanaan Program Sekolah Rakyat secara nasional setelah usulan pemerintah daerah mendapat respons positif dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Proses administrasi dan tahapan tender direncanakan mulai berjalan pada Maret 2026.

Kepastian tersebut disampaikan dalam audiensi antara Wali Kota Baubau, H. Yusran Fahim, SE, dengan Wakil Menteri Sosial (Wemensos) Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (28/01/2026).

Dalam pertemuan itu, Pemerintah Kota Baubau juga memperoleh dukungan tamba-

han berupa sejumlah program sosial lainnya, seperti Program Kampung Siaga Bencana, Lumbung Sosial, serta Program Pemberdayaan Sosial (PPS).

Wali Kota Baubau H Yusran Fahim menyambut baik respons tersebut dan menyatakan kesiapan penuh pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan seluruh program yang diberikan pemerintah pusat.

Ia mengungkapkan, sebagai langkah konkret percepatan, Pemerintah Kota Baubau akan membentuk tim lintas organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan kesiapan administrasi dan teknis sejak awal.

“Alhamdulillah, Kemensos merespons usulan Kota Baubau. Kita masuk tahap tiga, dan tentu ini peluang

besar yang harus kita persiapkan dengan serius,” ujar Yusran Fahim.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu prioritas Presiden yang pelaksanaannya harus mengedepankan sinergi lintas sektor.

“Perintah Presiden jelas, semua harus disinergikan dan dikolaborasikan antara pusat dan daerah,” kata Agus Jabo.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan melalui skema pembagian peran antar-kementerian. Untuk pembangunan fisik sekolah menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Adapun setelah

pembangunan rampung, pengelolaan operasional Sekolah Rakyat akan berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial.

Agus Jabo juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Baubau telah mengusulkan lahan seluas 7,9 hektare sebagai lokasi pembangunan. Lahan tersebut dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis.

Berdasarkan hasil evaluasi itu, Kota Baubau diarahkan masuk ke tahap ketiga pembangunan Sekolah Rakyat secara nasional dengan syarat utama kelengkapan proposal dan dokumen administrasi.

“Yang penting proposal dan administrasinya beres, lalu teknisnya kita kunci bersama,” pungkasnya. (*)

Walikota Baubau H Yusran Fahim Terima UHC Award 2026 Kategori Madya dari Pemerintah Pusat, Baubau Ukir Prestasi Nasional di Bidang Layanan Kesehatan

Laporan: Andina

J A K A R T A , BP-Komitmen Pemerintah Kota Baubau dalam memperluas akses layanan kesehatan kembali mendapat pengakuan nasional setelah meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Madya dari Pemerintah Pusat dalam acara nasional yang digelar di Jakarta.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan Deklarasi dan Pencanangan Universal Health Coverage (UHC) serta Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom JI-EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa

(27/1/2026).

Wali Kota Baubau, H. Yusran Fahim, SE, menerima langsung penghargaan tersebut mewakili Pemerintah Kota Baubau di hadapan para kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, piagam penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, didampingi Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan dedikasi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

Usai menerima penghargaan, Yusran Fahim menjelaskan bahwa salah satu indikator utama penilaian UHC Award adalah tingkat keaktifan kepesertaan masyarakat dalam program UHC.

Menurutnya, capaian kepesertaan aktif UHC di Kota Baubau saat ini telah melampaui 85 persen dari total jumlah penduduk, sehingga dinilai memenuhi standar nasional untuk kategori Madya.

Capaian tersebut, kata Yusran, merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemer-

intah Kota Baubau, tenaga kesehatan, serta dukungan masyarakat dalam membangun sistem layanan kesehatan yang inklusif.

Ia menegaskan bahwa penghargaan UHC Award 2026 bukan sekadar prestasi simbolik, tetapi menjadi pengakuan nyata atas keseriusan pemerintah daerah dalam menjamin pelayanan kesehatan yang mudah diakses, adil, dan merata.

Pemerintah Kota Baubau, lanjut Yusran, akan terus memperkuat program-program kesehatan serta memperluas cakupan perlindungan agar manfaat layanan benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Enam Daerah di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Baubau Raih UHC Award 2026



Pewarta: Firman

BAUBAU, DT - Enam Kabupaten/Kota di wilayah kerja Kantor Cabang BPJS Kesehatan Baubau berhasil meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2025 yang diserahkan di Jakarta.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang berkomitmen menjaga keaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakatnya.

Pejabat Pengganti Sementara (PPS) Kepala Cabang BPJS Kesehatan Baubau Eka Munawir menjelaskan, bahwa UHC Award merupakan penghargaan bagi pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang mampu memastikan sebagian besar penduduknya aktif sebagai peserta JKN.

“UHC ini adalah bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan kesehatan masyarakat melalui keaktifan peserta JKN,” tutur Eka saat diwawancara pada awak media di Kantor BPJS Selasa, (27/1/2026).

Eka menambahkan, dari Delapan wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Baubau meliputi Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton Tengah,

Buton Selatan, Kota Baubau, Buton Utara, dan Wakatobi terdapat Enam Daerah yang menerima penghargaan, yakni Kabupaten Buton Selatan, Kota Baubau, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna Barat, dan Kabupaten Wakatobi.

Eka menjelaskan, UHC Award dibagi ke dalam Tiga kategori. Kategori UHC Utama diberikan kepada Daerah dengan tingkat keaktifan peserta lebih dari 95 persen. Kategori UHC Madya diberikan kepada daerah dengan keaktifan peserta antara 85 hingga 95 persen, sementara Kategori UHC Pratama diberikan kepada Daerah dengan keaktifan peserta di kisaran 80 hingga 85 persen.

“Untuk tahun 2025, Kabupaten Buton Utara masuk kategori UHC Utama karena tingkat keaktifan pesertanya di atas 95 persen. Kemudian Kabupaten Buton Selatan, Kota Baubau, Muna Barat, dan Wakatobi masuk kategori UHC Madya. Sedangkan Kabupaten Buton Tengah berada pada kategori Pratama,” jelasnya.

Sementara itu, Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton belum berhasil meraih UHC Award karena tingkat keaktifan peserta JKN

belum mencapai ambang batas minimal 85 persen.

Eka mengungkapkan bahwa terdapat berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjaga status UHC, mulai dari kebijakan daerah hingga keterbatasan anggaran pascapandemi. Penurunan status UHC berdampak langsung pada keaktifan peserta, terutama terkait waktu aktivasi kepesertaan.

“Untuk daerah berstatus UHC prioritas, peserta yang didaftarkan hari ini bisa langsung aktif dan dilayani pada hari yang sama. Sementara untuk daerah non-UHC, kepesertaan baru aktif pada tanggal 1 bulan berikutnya,” terangnya.

Meski demikian, Eka menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah pada prinsipnya memiliki komitmen yang sama dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. BPJS Kesehatan berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat agar seluruh Daerah kembali mencapai status UHC.

“Inti dari UHC adalah menjaga kepuasan peserta serta memberikan rasa aman dan kemudahan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. (*)



Dengan capaian tersebut, Kota Baubau semakin menegaskan posisinya sebagai

salah satu daerah yang konsisten mendukung agenda nasional dalam mewujudkan cakupan

kesehatan semesta atau Universal Health Coverage. (*)